

Perubahan Kurikulum dan Kualitas Pendidikan

Oleh: Hendra Kurniawan

DALAM beberapa tahun terakhir ini ada banyak hal yang mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Pada awal tahun 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan mencabut kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sejak tahun pelajaran 2013/2014 tidak ada lagi sekolah yang berlabel RSBI dan pemerintah wajib menghap segala regulasi dan anggaran khusus untuk sekolah-sekolah tersebut. Meskipun terjadi pro dan kontra, namun kembali pada jiwa UUD 1945, maka keputusan ini dinilai tepat demi pemerataan kualitas dan hak memperoleh pendidikan.

Ujian Nasional (UN) juga menuai permasalahan yang cukup pelik. UN tahun 2013 mengalami banyak kendala teknis. Pencetakan soal yang tidak tepat waktu membuat distribusi naskah ke daerah-daerah menjadi terhambat. UN tahun 2013 terpaksa dilaksanakan secara bergelombang dan tidak serempak. Tentu hal ini mempengaruhi siswa secara psikis.

Belum lagi kualitas lembar jawaban yang buruk dan penggunaan barcode yang menimbulkan kekhawatiran terkait dengan proses pemindaian jawaban. Tak ayal lagi saat itu keabsahan UN 2013 dipertanyakan banyak pihak. Masih ditambah munculnya dugaan penyelewengan dana UN yang menyerap anggaran begitu besar namun kualitas pelak-

sanaannya sangatlah buruk.

Bersyukur pada tahun 2014, UN berlangsung relatif lancar tanpa kendala berarti. Bahkan hasilnya mengalami peningkatan termasuk jumlah kelulusan yang semakin banyak, meskipun sempat muncul tuduhan bahwa soal-soal yang diujikan tingkat kesulitannya terlalu tinggi.

Dari berbagai masalah itu, perubahan kurikulum menjadi hal yang paling merisaukan para pelaku pendidikan di akar rumput. Kegelesahan yang paling sering diungkapkan ialah pemberlakuan kurikulum yang mendadak dan seolah dipaksakan. Selain itu belum siapnya elemen-elemen pendukung terutama guru juga menjadi kendala. Padahal mulai tahun ajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara nasional. Sebelumnya kurikulum baru ini sudah mulai diterapkan namun hanya di beberapa sekolah yang ditunjuk.

Pendidikan bukan sekedar urusan otak dan akademik, namun lekat dengan pembentukan watak dan perilaku generasi muda. Pendidikan memegang peran penting bagi masa depan bangsa. Pemerintah dan masyarakat wajib memberi perhatian lebih serius demi peningkatan kualitas pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 mengatur secara jelas dan tegas

mengenai kewajiban negara (pemerintah) mencerdaskan kehidupan bangsa melalui suatu sistem pendidikan nasional yang berpihak pada warga negara. Demikian pula UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Artinya negara harus menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, dan daya saing bagi setiap warga negara.

Peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya dapat ditempuh melalui peninjauan kembali kurikulum. Akan tetapi dalam implementasinya, perubahan kurikulum tentu harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Guru sebagai pelaksana pendidikan dan ujung tombak bagi tercapainya tujuan pendidikan harus memahami dan menangkap jiwa kurikulum. Ketika guru belum memahami secara utuh bagaimana perencanaan, proses, hingga evaluasi pembelajaran harus dilakukan maka yang terjadi ialah pelaksanaan kurikulum yang sepotong-sepotong.

Perubahan kurikulum perlu didukung oleh perubahan dan perbaikan proses pembelajaran. Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui perubahan kurikulum menjadi sia-sia belaka tatkala guru tidak

berusaha mengubah paradigma pendekatan pembelajaran yang dilakukannya. Bukan zamannya lagi guru menjadi subjek dalam pembelajaran, guru hendaknya lebih berfungsi sebagai fasilitator yang memotivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran menjadi kering jika guru terus-menerus menjadi pusat pembelajaran dan satu-satunya sumber informasi. Untuk itu demi tercapainya tujuan Kurikulum 2013, guru harus berani tampil beda agar pembelajaran menemukan rohnyanya sebagai sarana pengembangan kemampuan dan kepribadian siswa seutuhnya.

Kurikulum 2013 mengarahkan pembelajaran konstruktif yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran menjadi perhatian penting yang berpengaruh pada pelaksanaan evaluasi. Harus dipahami bahwa penilaian pembelajaran bukan semata-mata berbicara soal kognitif saja namun juga meliputi perubahan sikap, perilaku, dan keterampilan siswa. Konsep UN yang ada saat ini beserta segala persoalannya jelas merupakan kebijakan yang tidak bijak. Untuk itu pemerintah dan para ahli pendidikan perlu merumuskan konsep evaluasi akhir yang lebih tepat dan dapat mengukur kemampuan siswa secara otentik dan komprehensif. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP USD